

Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung

¹ IDA ZULFIDA, ² AKHMAD FAUZI, ³ ERNAN RUSTIADI, ⁴ YUSMAN SYAUKAT

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan,

² Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB Bogor,

³ Fakultas Pertanian, IPB Bogor, ⁴ Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Bogor

email: ¹ ida.zulfida@yahoo.co.id; ² fauziakhammad@gmail.com; ³ ernan@indo.net.id; ⁴ ysyaukat@gmail.com

Abstract. There have been many studies in assessing the performance of the PNPM Rural product, but in general, the assessment analyzed using qualitative descriptive approach. This study aims to measure changes in the productivity performance of the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural in Bandung District from 2009 to 2013. In this study the performance assessment PNPM Rural measured using instruments Data Envelopment Analysis (DEA) based on measures Malmquist Total Factor Productivity Index. The result shows an increase in the performance of PNPM Rural in Bandung. The results also showed that among subdistricts receiver PNPM Rural program which has the best performance is dominated by the agricultural business sector. Based on these findings, given the experience and knowledge of both central and local governments in improving the PNPM Rural program to accelerate poverty reduction in rural areas

Keywords: National Program for Community Empowerment in Rural Area (PNPM Rural), malmquist total factor productivity index, efficiency change, technical change.

Abstrak. Sudah banyak penelitian dalam menilai produktivitas kinerja PNPM Mandiri Perdesaan, namun pada umumnya penilaian tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengukur perubahan produktivitas kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung dari tahun 2009 hingga 2013. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kinerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan instrumen *Data Envelopment Analysis (DEA)* berdasarkan langkah-langkah *Malmquist Total Factor Productivity Index*. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi peningkatan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung, diantara kecamatan yang memiliki kinerja terbaik didominasi oleh sektor lapangan usaha pertanian. Berdasarkan hasil temuan ini, memberi pengalaman dan pengetahuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam perbaikan pada program PNPM Mandiri Perdesaan ataupun program pemberdayaan sejenis untuk mempercepat pengurangan kemiskinan perdesaan dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Kabupaten Bandung, PNPM Mandiri Perdesaan, produktivitas, Indeks Total Faktor Produktivitas Malquist.

Pendahuluan

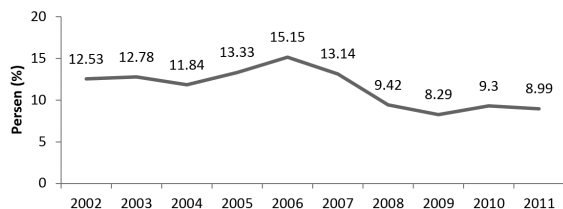
Kedekatan wilayah Kabupaten Bandung dengan pusat perekonomian dan pemerintahan Jawa Barat mencerminkan posisi yang strategis baik secara perekonomian nasional maupun lokal. Tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung secara umum dilihat dari kondisi makro ekonomi menunjukkan *trend* peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2008, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung sebesar 5,3% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,15%. Dilihat dari peran sektoral, peran sektor industri di Kabupaten Bandung dalam skala regional maupun nasional juga sangat strategis. Peran sektoral dari sektor industri dan pertanian di Kabupaten Bandung tidak berbeda jauh dengan peran sektoral dalam PDRB Jawa Barat dan PDB. Pola tersebut mengindikasikan

Received: 26 Maret 2015, **Revision:** 23 Oktober 2015, **Accepted:** 27 Desember 2015

Print ISSN: 0215-8175; **Online ISSN:** 2303-2499. Copyright©2015. Published by Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba Terakreditasi SK Kemendikbud, No.040/P/2014, berlaku 18-02-2014 s.d 18-02-2019

adanya korelasi peningkatan kapasitas perekonomian nasional dan regional dengan peningkatan kapasitas perekonomian di Kabupaten Bandung. Namun, masih relatif tingginya tingkat kemiskinan (Gambar 1) dan perlambatan pengurangan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Bandung.



Sumber: BPS

Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung, 2002-2011

Kondisi Kabupaten Bandung juga menunjukkan kenaikan tingkat pendapatan per kapita (Tabel 1), namun masih di bawah rata-rata tingkat pendapatan per kapita Jawa Barat.

Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam membangun kapasitas mampu mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Kapasitas lokal yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat mengakses segala hal yang berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan ekonomi dan iklim yang kondusif dalam aktivitas produksi atau pekerjaan. Akses tersebut berhubungan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, lokasi usaha atau lahan, informasi pasar, teknologi, serta sarana dan prasarana produksi lainnya. Faktor yang menjadi masalah sosial ekonomi di perdesaan atau pada tingkat lokal yaitu keterbatasan terhadap aspek-aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, kelestarian lingkungan, pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penguatan kelembagaan, dapat menghambat peluang masyarakat untuk memperbaiki

kondisi perekonomian.

Persepsi masyarakat Indonesia yang berkembang selama ini tentang desa selalu identik dengan kemiskinan, dan memandang perdesaan sebagai wilayah yang tidak strategis sehingga agak terlupakan dalam berbagai program pembangunan Indonesia (Wisjnuprpto, 2010: 79). Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di perdesaan dan bekerja sebagai petani kecil. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Perdesaan diharapkan berfungsi sebagai basis dalam melahirkan sumber daya manusia yang andal yang dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan (Jamal, 2009: 13).

Beberapa program pembangunan perdesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program sejenis lainnya, merupakan upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan perdesaan. Namun program tersebut masih belum mampu mencapai tujuan dalam penanggulangan kemiskinan.

Solusi keluar dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijakan, komitmen, organisasi dan program yang tepat. Selama ini pembangunan perdesaan di Indonesia tidak didasari oleh analisis yang menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang ada di perdesaan. Program yang dilaksanakan pada umumnya bersifat parsial, yang terkadang tidak jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya bahkan berjalan tumpang tindih sehingga tidak efektif dan bahkan terjadi pemborosan dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat perdesaan yang semakin heterogen, namun kemampuan pemerintah sebagai penggerak

Tabel 1
Pendapatan per Kapita Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten Bandung	9.010,2	10.134,6	11.141,4	12.457,6	12.856,3	14.519,5	15.554,8
Jawa Barat	9.824,5	11.720,7	12.769,2	14.359,9	15.542,4	17.155,1	18.803,3

Sumber: BPS.

utama pembangunan perdesaan semakin terbatas, maka sangat dibutuhkan program yang benar-benar dapat memberdayakan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan saat ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program ini mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kabupaten Bandung yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Sejak digulirkan PPK tahun 1998 sampai PNPM Mandiri Perdesaan saat ini, terdapat 11 kecamatan di Kabupaten Bandung yang telah menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program tersebut, terdiri atas 11 kecamatan aktif penerima Dana BLM.

Dalam mengkaji apakah program tersebut sudah sesuai atau belum, maka perlu adanya evaluasi kinerja program yang sudah berjalan, yaitu dengan melakukan pengukuran yang tepat terutama terhadap penggunaan *input* mencakup alokasi anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sudah banyak dilakukan antara lain oleh Labombang (2011); Riduan dan Nasripiani (2014); Widayati (2013) dan Murbeng *et al.* (2013) umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini akan mengevaluasi kinerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan

instrument *Data Envelopment Analysis (DEA)* berdasarkan langkah-langkah *Malmquist Productivity Index*. Penelitian ini bertujuan mengukur perubahan produktivitas kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung dari 2009 sampai dengan 2013.

Pengertian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan juga ditujukan sebagai usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan (Adismita, 2006: 3).

Pembangunan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan terpisah dengan konsep pertumbuhan di mana pembangunan memiliki konsep yang lebih luas meliputi berbagai aspek yaitu aspek sosial, lingkungan dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2010: 107).

Pada hakikatnya pembangunan merupakan sebuah proses perubahan progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu maupun komunitas melalui pengembangan, intensifikasi dan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya (Shaffer *et al.*, 2004: 3). Namun menurut (Chambers, 1983: 13), tercerainya sektor perdesaan dengan pembangunan perkotaan dan terjadinya disilusi terhadap hasil-hasil pembangunan yang mengabaikan peran perdesaan telah menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah perdesaan. Selanjutnya Chambers menyatakan, masyarakat akan dapat menikmati pertumbuhan apabila diberdayakan. Pembangunan yang bertumpu

Tabel 2
Kecamatan Penerima Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Kriteria Lokasi	Keterangan
1	Arjasari	Lama, TA 2008-2013	PPK / PNPM-MPd
2	Cimaung	Lama, TA 2008-2013	PPK / PNPM-MPd
3	Ibun	Lama, TA 2008-2013	PPK / PNPM-MPd
4	Kertasari	Lama, TA 2008-2013	PPK / PNPM-MPd
5	Pacet	Lama, TA 2009-2013	PPK / PNPM-MPd
6	Cicalengka	TA 2009-2013	PNPM-MPd
7	Cikancung	TA 2009-2013	PNPM-MPd
8	Ciwidey	TA 2009-2013	PNPM-MPd
9	Nagreg	TA 2009-2013	PNPM-MPd
10	Pangalengan	TA 2009-2013	PNPM-MPd
11	Rancabali	TA 2009-2013	PNPM-MPd

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung 2014.

pada manusia (*people-centered*), partisipasi, pemberdayaan dan berkelanjutan merupakan pilihan strategi pembangunan bagi banyak negara termasuk Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan alat penting untuk memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan kinerja organisasi (Murbeng, 2013: 1260-1261). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan, dan berkelanjutan (Kartasmita, 1996: 144, 159-160).

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, harus disadari program pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

Menurut Adisasmita (2006: 87-88),

efektivitas perencanaan harus dilihat dari pencapaian sasaran ataupun tujuan program yang terdiri dari *input*, proses dan *output*. *Input* adalah sumber daya manusia, sumber dana serta dana dan informasi. Sumber daya manusia yang baik diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa berdasarkan usulan dari bawah (*bottom-up*).

Ada hubungan yang erat antara sumber daya manusia dengan modal sosial. Modal sosial adalah hasil dari hubungan antar individu yang memfasilitasi suatu tindakan bersama (Nasution et al, 2014: 139). Oleh karenanya, tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah harus mempertimbangkan kinerja sosial budaya masyarakatnya, seperti interaksi sosial, akses masyarakat pada pendapatan, pendidikan, kesehatan dan proses demokrasi (Rustiadi et al, 2009: 448).

Dalam konteks ini peranan kelembagaan desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat sangat penting. Disamping itu, dana pembiayaan pembangunan bersumber dari pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, baik dari pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan dari luar daerah yaitu APBN, APBD, maupun investasi swasta. Dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, sehingga

alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat belum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, koordinasi dan keterpaduan sangat penting melalui kesamaan sudut pandang terkait masalah pembangunan yang dihadapi perdesaan agar lebih efisien dan dapat menekan dana pembangunan di wilayah perdesaan.

Selanjutnya Adisasmita (2006: 134) mengatakan bahwa pentingnya pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal. Dengan kata lain, bahwa program yang dilaksanakan dalam pembangunan perdesaan haruslah memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri.

PNPM Mandiri Perdesaan yang hadir sejak tahun 2007 dilaksanakan melalui harmonisasi dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (PNPM Mandiri, 2009: 1). Masyarakat sebagai aktor memiliki hak memanfaatkan, memutuskan dan mengendalikan implementasi dari PNPM Mandiri Perdesaan ini. Keterbukaan dan akuntabilitas sebagai sistem dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat memperbarui pola pelaksanaan pembangunan perdesaan dan mendorong pengembangan wilayah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2010-2015 telah ditentukan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah. Adanya perubahan dinamis dalam kondisi perekonomian, pada satu sisi menuntut adanya respon atau tanggapan yang cepat seluruh *stakeholders* perekonomian terhadap perubahan yang terjadi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Leichtenstein dan Lyons (2001: 3, pembangunan itu sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk bertindak, berinovasi, dan menghadapi keadaan yang berbeda. Untuk itu dalam menentukan arah pembangunan pada tahap implementasi diperlukan antara lain parameter atau indikator yang dapat memudahkan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah diselenggarakan (Bappeda, 2011: 2). Sebagaimana Dunn (2003: 608) menyatakan bahwa evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan

bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan dimana evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran program itu sendiri. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk menyatakan apakah kebijakan atau program tertentu telah mencapai kinerja yang tertinggi atau rendah.

Rossi dalam Widodo (2007: 118-122) menyebutkan salah satu tipe evaluasi kebijakan publik adalah melalui *Economic Efficiency Evaluation* yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengevaluasi suatu kebijakan atau program yang bertujuan untuk menghitung efisiensi ekonomi yang dilatarbelakangi oleh kondisi dimana suatu sumber daya itu memiliki sifat keterbatasan.

Metode dan Data Penelitian

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah program linear non-parametrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari *decision making unit* (DMU) atas dasar beberapa *input* dan *output* (Charnes, Cooper, Rhodes, 1978: 429). Konsep indeks produktivitas Malmquist awalnya digagas oleh Profesor Sten Malmquist sebagai kuantitas untuk menganalisis pemakaian *input* (Malmquist, 1953: 210). Kemudian Fare *et al.* pada tahun 1992 membangun indeks produktivitas Malmquist langsung dari *input* dan *output* data dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis*.

Secara khusus, DEA berbasis indeks produktivitas malmquist selanjutnya disebut dengan Indeks total faktor produktifitas Malmquist atau Malmquist Indeks (MI). Dalam beberapa penelitian indeks total faktor produktivitas malmquist telah terbukti menjadi alat yang baik untuk mengukur perubahan produktivitas DMU dari waktu ke waktu, dan telah berhasil diterapkan di berbagai bidang (Yoruk dan Zaim, 2005: 403; Yu, Liao, dan Shen, 2013: 2).

Penelitian ini menggunakan metode Malmquist dengan mempertimbangkan satu set *n* DMU, dimana DMU yakni kecamatan-kecamatan yang mendapat alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan dimana masing-masing menggunakan *m* *input* yang berbeda untuk menghasilkan *s* *output* yang berbeda. Variabel *input* dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan, jumlah penduduk dan jumlah lembaga desa, sedangkan variabel *output*nya adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan jumlah

tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung. Data primer diperoleh dari anggota dan pengurus PNPM Mandiri Perdesaan serta para tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung.

Notasi x_{ij}^t, y_{rj}^t merupakan *ith* *input* dan *rth* *output* dari masing-masing *jth* DMU pada suatu titik tertentu dalam waktu *t*. Perhitungan DEA indeks malmquist membutuhkan dua periode-tunggal dan dua langkah periode campuran. Kedua ukuran periode tunggal diperoleh dengan memecahkan model dasar DEA. Dalam penelitian ini bertujuan peningkatan dari kinerja yang dihasilkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja. Persamaan model berdasarkan pendekatan *output-oriented* Model DEA adalah sebagai berikut:

$$d_o^t(x_o^t, y_o^t) = \min \theta$$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^t \lambda_j \geq x_{io}^t \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n y_{rj}^t \lambda_j \leq \theta y_{ro}^t \quad r = 1, \dots, s$$

$$\lambda_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

Program linier ini dihitung secara terpisah untuk masing-masing DMU, dan subscript, *o*, menunjukkan pada DMU yang efisien yang akan dievaluasi. θ ($0 < \theta \leq 1$) adalah pengurangan secara proporsional yang beraturan pada *output* DMU_o. Nilai jumlah minimal disebut sebagai skor efisiensi DEA untuk DMU_o, demikian juga dengan fungsi jarak DMU_o pada tahun *t*, yaitu, $d_o^t d_o^t(x_o^t, x_o^t, y_o^t, y_o^t)$. Hasilnya akan menunjukkan jika nilai θ sama dengan satu maka DMU efisien dan kombinasi *input-output* terletak di perbatasan (*frontier*) efisiensi. Apabila ditemukan $\theta < 1$, maka DMU adalah tidak efisien, dan terletak di dalam *frontier*. Dengan cara yang sama menggunakan *t* + 1 seperti *t* untuk model di atas, kita memperoleh skor efisiensi DMU_o dalam iangka waktu *t* + 1, dinotasikan sebagai $d_o^{t+1} d_o^{t+1}(x_o^{t+1}, x_o^{t+1}, y_o^{t+1}, y_o^{t+1})$.

Untuk langkah-langkah selama periode yang berlaku, yang pertama ditetapkan sebagai $d_o^{t+1} d_o^{t+1}(x_o^{t+1}, x_o^{t+1}, y_o^{t+1}, y_o^{t+1})$ untuk DMU_o, yang dihitung sebagai nilai optimal yang dihasilkan dari persoalan

program linear, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$d_o^t(x_o^{t+1}, y_o^{t+1}) = \min \theta$$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^t \lambda_j \geq x_{io}^{t+1}, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n y_{rj}^t \lambda_j \leq \theta y_{ro}^{t+1}, \quad r = 1, \dots, s$$

$$\lambda_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Model ini membandingkan (x_o^{t+1}, y_o^{t+1}) ke *frontier* pada waktu t . Demikian pula kita bisa mendapatkan ukuran secara keseluruhan dalam periode lainnya $d_o^{t+1}(x_o^{t+1}, y_o^{t+1})$ yang membandingkan (x_o^t, y_o^t) untuk perbatasan pada waktu $t + 1$.

Indeks Malmquist ini didasarkan pada konsep fungsi produksi yang merupakan fungsi kemungkinan produksi maksimum, sehubungan dengan seperangkat input yang berkaitan dengan modal dan tenaga kerja. Indeks Malmquist ini membutuhkan data panel gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu/ruang) dan tidak membutuhkan asumsi perilaku dari produsen, menggunakan output jamak dan didefinisikan menggunakan fungsi jarak.

Fare *et al* (1992) merumuskan perhitungan output yang mengukur produktivitas DMU_o tertentu pada waktu $t+1$ dan t , dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$m_0(y_{t+1}, x_{t+1}, y_t, x_t) = \left[\frac{d_{t+1}^0(x_{t+1}, y_{t+1})}{d_t^0(x_t, y_t)} \right] \left[\frac{d_t^0(x_{t+1}, y_{t+1})}{d_{t+1}^0(x_{t+1}, y_{t+1})} \right] x \frac{d_t^0(x_t, y_t)}{d_{t+1}^0(x_t, y_t)} \Bigg]^{1/2}$$

dimana :

t	= periode
$m_0(y_{t+1}, x_{t+1}, y_t, x_t)$	= Total Factor Productivity Change (TFPCH) Malmquist Index (MI _o)
$\frac{d_{t+1}^0(x_{t+1}, y_{t+1})}{d_t^0(x_t, y_t)}$	= Efficiency Change (EFFCH)
$\frac{d_t^0(x_{t+1}, y_{t+1})}{d_{t+1}^0(x_{t+1}, y_{t+1})} x \frac{d_t^0(x_t, y_t)}{d_{t+1}^0(x_t, y_t)}$	= Technical Change (TECHCH)

Apabila hasil indeks Malmquist yang dilambangkan dengan MI adalah sebagai berikut: $MI_o > 1$ menunjukkan kemajuan dalam produktivitas faktor total dari DMU_o dari periode t ke $t+1$, $MI_o = 1$ menunjukkan keadaan tetap dan $MI_o < 1$ menunjukkan kemunduran produktivitas. Indeks Malmquist dapat diuraikan menjadi dua komponen yaitu untuk mengukur perubahan dalam efisiensi (EFFCH) dan mengukur perubahan teknik (TECHCH).

Perubahan efisiensi menunjukkan

besarnya perubahan efisiensi dari t periode ke $t + 1$, yang juga mencerminkan kemampuan kecamatan menggunakan alokasi dana anggaran PNPM Mandiri Perdesaan yang efisien. Sedangkan perubahan teknis berguna untuk mengukur pergeseran teknologi perbatasan antara dua periode waktu.

Dalam artikel ini, kinerja PNPM Mandiri Perdesaan dinilai berdasarkan orientasi output, peningkatan efisiensi terjadi ketika pekerjaan yang dihasilkan dari alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. Sedangkan perubahan teknis berfungsi mengarahkan pada strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pekerjaan yang dihasilkan dari alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk kedua komponen, nilai lebih besar dari satu menunjukkan peningkatan aspek tersebut, sementara nilai kurang dari satu menyiratkan telah terjadi pemborosan dalam penggunaan dana alokasi anggaran atau kemunduran dalam strategi meningkatkan pendapatan dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.

Penelitian selanjutnya adalah menggunakan indeks malmquist untuk mengukur efek gabungan dari perangkat tambahan efisiensi dan perubahan teknis pada masing-masing kecamatan untuk melihat dampak dan hasil kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

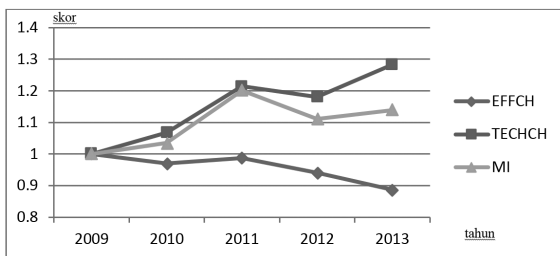
Hasil dan Pembahasan

Selama enam tahun pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung telah mendanai 1.635 usulan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini meliputi penyediaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Prasarana umum berupa pembuatan jalan poros desa meliputi perkerasan rabat beton ataupun perkerasan aspal, pembuatan tembok penahan tanah, pembuatan drainase, pembuatan jembatan dan lainnya.

Kegiatan pendidikan meliputi pembuatan gedung madrasah, pembuatan gedung PAUD, pembuatan gedung SD/Ibtidaiyah, serta pelatihan pendidikan. Kegiatan di bidang kesehatan meliputi pembuatan gedung posyandu, pembuatan MCK, PMT bulanan balita dan ibu hamil/menyusui. Dan kegiatan di bidang ekonomi adalah simpan pinjam

perempuan (SPP) yang merupakan produk unggulan PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, terutama kaum perempuan (kesetaraan gender) agar lebih produktif.

Total dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang telah diluncurkan (Tabel 3) di Kabupaten Bandung TA 2008 sampai dengan 2013 sebesar ± Rp108.75 Miliar yang bersumber dari APBN Rp 90.9 Miliar dan APBD Rp17.85 Miliar dengan kontribusi swadaya masyarakat sebesar Rp 4.46 Miliar. Jumlah pemanfaat hasil kegiatan mencapai 1.184.318 orang diantaranya 53.4% A-RTM. Temuan hasil penelitian menunjukkan perubahan total faktor produktivitas (Malmquist Index) kumulatif (Gambar 1) terhadap kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung dengan *trend* meningkat yang diukur mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Fare *et al.* dalam Coelli (1996: 26) menetapkan indeks perubahan produktivitas *output-based* Malmquist adalah jika nilai lebih besar dari satu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP) yang positif dari periode t ke periode t+1. Berdasarkan teori tersebut bahwa kinerja program PNPM Mandiri Perdesaan secara keseluruhan di Kabupaten Bandung semakin baik dari tahun ke tahun.



Sumber: data diolah

Gambar 2
Evolusi dari MI, EFFCH dan TECHCH
dari tahun 2009-2013

Pengukuran juga dilakukan terhadap perubahan kedua komponen yaitu perubahan efisiensi (EFFCH) dan perubahan teknik

(TECHCH). Tren perubahan Indeks total faktor produktivitas Malmquist dapat dilihat bahwa kecamatan-kecamatan yang mendapat alokasi dana anggaran PNPM Mandiri Perdesaan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang cukup dalam kinerja yaitu sebesar 33% (lebih dari 30%) selama periode ini, dan perubahan tertinggi didominasi oleh perubahan teknis sebesar 64%.

Temuan ini menunjukkan bahwa sumber utama pertumbuhan ini adalah terjadinya peningkatan pada perubahan teknis dengan adanya pengorbanan (biaya) yang ditunjukkan oleh penurunan perubahan efisiensi sebesar 3%. Hasil tersebut diperoleh dengan melakukan perkalian berurutan dari perubahan setiap tahunnya (Tabel 4) yang dimulai dari 2009 sebagai tahun indeks yang dianggap sama dengan satu. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan perubahan teknis dibutuhkan pengorbanan atau biaya yang menyebabkan penurunan pada perubahan efisiensi. Perubahan efisiensi tidak dapat ditekan menyebabkan terjadinya inefisiensi yang dapat dilihat pada hasil pengukuran yang menunjukkan nilai kurang dari satu.

Beberapa penyebab terjadinya inefisiensi dapat diakibatkan oleh *input* sumber daya manusia yang masih rendah, keberadaan lembaga desa yang belum memberikan hasil yang memuaskan dalam proses penyusunan rencana pembangunan akibat rendahnya kemampuan para perencana ditingkat desa. Menurut Adisasmita (2006: 134), program yang dilaksanakan haruslah memberdayakan masyarakat agar masyarakat bisa mandiri. Masyarakat dapat belajar menyusun rencana, menjalankan dan mengawasi program tersebut. Pelaksanaan program dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab, aktif dan merasakan manfaat dari program pemberdayaan tersebut. Dampak positif dari pemberdayaan masyarakat juga dapat menekan biaya sehingga menghindari pemborosan atau inefisiensi.

Tabel 3
Rincian Alokasi Dana BLM Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	TA 2008-2012 (Rp)	BLM TA 2013 (Rp)	Total (Rp)
1	Prasarana Umum	37.643.935.600	7.913.699.850	45.557.635.450
2	Pendidikan	16.912.110.450	5.680.222.850	22.592.333.300
3	Kesehatan	15.130.057.550	4.441.282.500	19.571.340.050
4	Ekonomi	17.463.896.400	3.561.487.800	21.025.384.200

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung 2014.

Di samping itu, pemilihan pengurus dalam kelembagaan desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dilakukan secara tidak selektif, sehingga menyebabkan pengurus yang duduk dalam kelembagaan adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dalam pembangunan perdesaan. Oleh karena itu, pemilihan orang-orang yang akan mengurus kelembagaan desa harus objektif agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembangunan di wilayah perdesaan. Penyebab perubahan efisiensi menurun juga terjadi karena pengalokasian dana yang tidak efektif dan tidak berdasarkan skala prioritas. Dana anggaran pembangunan yang tersedia relatif terbatas sedangkan program yang dilaksanakan jumlahnya relatif banyak.

Partisipasi masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan perdesaan sangat dibutuhkan. Nasution *et al.* (2014: 147) menyatakan bahwa rumah tangga perdesaan (terutama rumah tangga miskin) dapat meningkatkan akses terhadap modal sosial melalui partisipasi pada kegiatan kemasyarakatan. Kemudian, masyarakat di perdesaan perlu difasilitasi untuk meningkatkan jumlah dan kegiatan organisasi sosial atau lembaga desa yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan meningkatkan akses terhadap modal sosial. Hal ini dilakukan untuk menunjang implementasi pembangunan serta program pengurangan kemiskinan masyarakat di perdesaan.

Tabel 4
Indeks Malmquist (MI) Rata-Rata per Tahun

Tahun	EFFCH	TECHCH	TFPCH
2009-2010	0.970	1.067	1.035
2010-2011	1.018	1.139	1.160
2011-2012	0.952	0.972	0.925
2012-2013	0.943	1.086	1.025
mean	0.97	1.064	1.033

Sumber: data diolah dengan windeap

Perubahan indeks total faktor produktivitas Malmquist terbaik dalam penelitian ini adalah pada periode 2010-2011 yang meningkat sebanyak 160%. Angka ini menurut Fare *et al.* dalam Coelli (1996: 26) menunjukkan bahwa pada periode 2010-2011 perubahan produktivitas Malmquist adalah positif (1.160) yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor *input* seperti anggaran PNPM

Mandiri Perdesaan, penduduk dan lembaga desa memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan PAD dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Pada 2011-2012 mengalami kemunduran produktivitas dan merupakan posisi terendah selama program berjalan yaitu sebesar 75%. Angka ini menunjukkan perubahan produktivitas negatif (0.925) yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor *input* belum menghasilkan output seperti yang diharapkan.

Hal yang sama juga terjadi pada perubahan teknik dimana nilai tertinggi pada periode 2010-2011 sebesar 139% dan terendah pada 2011-2012 mengalami kemunduran 25%. Keseluruhan kinerja kecamatan-kecamatan yang mendapat alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir pada Tabel 5.

Dari hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa Kecamatan Cikancung, Ciwidey, Pacet dan Pangalengan memiliki nilai perubahan indeks total faktor produktivitas Malmquist kurang dari satu yang berarti menunjukkan kemunduran atau perubahan produktivitas negatif kinerja PNPM Mandiri Perdesaan selama periode ini. Kecamatan Pangalengan mengalami kemunduran terbesar sebesar 270% (0.73) pada periode tahun 2009 hingga 2010, mengalami peningkatan cukup signifikan pada periode tahun 2010-2011 sebesar 366% (1.366) dan mengalami kemunduran pada periode-periode berikutnya yaitu pada periode tahun 2011-2012 sebesar 266%, periode tahun 2012-2013 sebesar 255%, dengan rata-rata penurunan indeks total faktor produktivitas malmquist pada setiap tahunnya sebesar 141%.

Temuan ini mengartikan bahwa diperlukan strategi dan upaya-upaya yang lebih besar untuk mencapai target secara dinamis dalam meningkatkan kinerja di kecamatan tersebut. Menurut Ridwan dan Nasripiani (2014) yang melakukan penelitian tentang kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menyimpulkan bahwa perlu ditinjau kembali hal yang berhubungan dengan produktivitas dan respons kinerja yang masih lemah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sosialisasi tujuan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pelatihan dan pendampingan. Sementara Kecamatan Nagreg tetap, hal ini ditunjukkan dengan nilai perubahan produktivitas sama dengan satu yang berarti tidak mengalami kemajuan ataupun kemunduran dalam

Tabel 5
Indeks Produktivitas Malmquist per Kecamatan

Kecamatan	Indeks	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Mean	Rank
Arjasari	EFFCH	1	1.185	0.723	1.384	1.043	
	TECHCH	0.983	1.827	1.005	1.067	1.178	1
	TFPCH	0.982	2.165	0.726	1.477	1.229	
Cicalengka	EFFCH	0.816	1.136	1.033	1.045	1	
	TECHCH	1.065	1.04	1.037	0.971	1.028	5
	TFPCH	0.868	1.181	1.071	1.015	1.028	
Cikancung	EFFCH	1	0.949	1.054	0.743	0.925	
	TECHCH	0.98	0.937	1.021	1.316	1.054	9
	TFPCH	0.98	0.889	1.076	0.965	0.975	
Cimaung	EFFCH	1.01	0.939	1.032	0.779	0.934	
	TECHCH	1.026	1.034	1.033	1.258	1.084	6
	TFPCH	1.036	0.971	1.067	0.979	1.012	
Ciwidey	EFFCH	1	1	1	0.913	0.978	
	TECHCH	0.774	1.241	1.126	0.943	1.005	8
	TFPCH	0.774	1.241	1.126	0.861	0.982	
Ibun	EFFCH	1.043	1	0.903	1.009	0.987	
	TECHCH	1.819	1.069	0.804	1.061	1.135	3
	TFPCH	1.898	1.069	0.726	1.071	1.121	
Kertasari	EFFCH	1.007	0.902	1.003	0.964	0.968	
	TECHCH	0.994	1.643	1.077	1.147	1.192	2
	TFPCH	1.001	1.483	1.08	1.106	1.154	
Nagreg	EFFCH	0.97	0.894	1.016	0.862	0.934	
	TECHCH	1.019	1.06	1.019	1.197	1.071	7
	TFPCH	0.988	0.948	1.036	1.032	1	
Pacet	EFFCH	0.937	1.14	0.779	0.833	0.912	
	TECHCH	1.067	1.036	0.95	1.111	1.039	10
	TFPCH	0.999	1.182	0.74	0.925	0.948	
Pangalengan	EFFCH	0.906	1.103	1	1	1	
	TECHCH	0.806	1.238	0.734	0.745	0.859	11
	TFPCH	0.73	1.366	0.734	0.745	0.859	
Rancabali	EFFCH	1	1	1	1	1	
	TECHCH	1.587	1.769	0.957	1.271	1.104	4
	TFPCH	1.587	1.769	0.957	1.271	1.104	

Sumber: data diolah dengan windeap

kinerjanya. Dalam hal ini, Kecamatan Nagreg perlu memperhatikan strategi yang dapat dijadikan potensi perbaikan agar terjadi peningkatan kinerja. Sedangkan kecamatan Arjasari, Cicalengka, Cimaung, Ibun, Kertasari, dan Rancabali menunjukkan peningkatan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan nilai perubahan produktivitas lebih dari satu.

Beberapa kecamatan berhasil melaksanakan produktivitas kinerja terbaik, yaitu berturut-turut adalah Kecamatan Arjasari, Kertasari, Ibun, dan Rancabali melakukan kinerja yang sangat baik dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat selama periode ini. Bila kita lihat indeks total faktor produktivitas Malmquist kecamatan Arjasari dari tahun ke tahun menunjukkan pada periode tahun 2009-

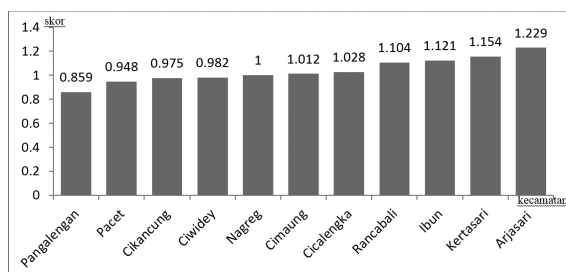
2010 kemunduran sebesar 18%, kemudian pada periode tahun 2010-2011 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 1165%, kemudian menurun pada periode tahun 2011- 2012 sebesar 274%, dan kembali naik pada periode tahun 2012-2013 sebesar 477%, dengan rata-rata kenaikan indeks total faktor produktivitas Malmquist sebesar 229% setiap tahunnya.

Temuan ini mengartikan kecamatan tersebut telah menyadari target untuk meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Perdesaan secara dinamis. Namun peningkatan produktivitas belum dapat dilaksanakan bertahap setiap tahun. Hal ini dapat kita lihat dari nilai indeks total produktivitas Malmquist yang trennya naik turun.

Menurut Fauzi (2010:107),

pembangunan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perbaikan pada program pemberdayaan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan serta melalui pengembangan, intensifikasi dan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya (Shaffer *et al.*, 2004: 3) dapat diterapkan di Kabupaten Bandung.

Merujuk dari latar belakang pekerjaan penduduk, kecamatan-kecamatan dengan produktivitas terbaik memiliki penduduk yang mayoritas bekerja pada lapangan usaha pertanian. Hal ini mengisyaratkan bahwa lapangan usaha di bidang pertanian masih memiliki kekuatan untuk dapat meningkatkan pembangunan di perdesaan. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Hermawan (2012), yang menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan di perdesaan yang identik dengan sektor pertanian diharapkan memberikan kontribusi lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.



Sumber: Data diolah

Gambar 3. Perkembangan Kinerja PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009-2013

Uraian di atas diilustrasikan pada Gambar 3 yang menunjukkan perkembangan kinerja

di sebelas kecamatan yang mendapatkan alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Stephen (2011: 170) bahwa akumulasi modal merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua investasi untuk meningkatkan output dan sumber daya manusia itu sendiri. Dalam hal ini PNPM Mandiri Perdesaan yang telah menggulirkan dana BLM dalam membangun perdesaan melalui berbagai kegiatan penyediaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah bekerja dengan baik dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan menciptakan peluang lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung. Selain itu sebagaimana dikemukakan bahwa strategi dan pemikiran-pemikiran baru tetap diperlukan dalam keberlanjutan pembangunan wilayah perdesaan.

Simpulan dan Saran

Artikel ini menyajikan studi empiris perubahan total faktor produktivitas (Malmquist Index) kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung yang dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Secara umum, perubahan produktivitas kinerja PNPM di Kabupaten Bandung meningkat namun masih membutuhkan perencanaan dan strategi yang dinamis untuk peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan-kecamatan dengan kinerja terbaik didominasi oleh kecamatan yang latar belakang penduduknya bekerja pada lapangan usaha pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung perlu memperhatikan perbaikan di sektor pertanian, terutama di subsektor peternakan dan hortikultura.

Hasil analisis pemberdayaan melalui instrumen DEA ini mengindikasikan adanya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis ini dapat dijadikan pembelajaran (*lesson learned*) dalam memperbaiki kinerja program eksisting maupun pengembangan program pemberdayaan dimasa yang akan datang.

Secara umum implikasi kebijakan untuk wilayah berdampak pada efek multiplier ekonomi masyarakat dan mobilitas tenaga kerja. Alokasi pada kegiatan ekonomi dapat menciptakan perluasan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi secara luas. Disamping itu *spillover* atau efek limpahan dari pemberdayaan dapat meningkatkan

kecakapan dan pengetahuan masyarakat sehingga peningkatan kapasitas masyarakat dapat tercapai.

Program pemberdayaan adalah ibarat "vitamin" yang akan meningkatkan vitalitas ekonomi di perdesaan. Namun, agar "vitamin" tersebut efektif diimplementasikan maka diperlukan insentif, baik berupa fiskal (kemudahan pajak, perizinan, maupun subsidi) dan juga insentif moneter berupa pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah dan sebagainya. Insentif juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian *reward* bagi kelompok, individu, atau desa yang berkinerja baik melalui peningkatan akses terhadap pasar, peningkatan skala ekonomi maupun penghargaan individu atau kelompok dalam bentuk promosi status sosial dan sebagainya.

Melalui program pemberdayaan diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat sehingga dapat menekan biaya-biaya yang bisa ditekan atau dihemat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan mengingat kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan perdesaan semakin terbatas. Dengan efisiensi dan strategi perencanaan yang tepat kinerja program-program pemberdayaan sejenis diharapkan percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan dapat segera diatasi.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kecamatan dalam Angka*. BPS, Kabupaten Bandung.
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda. (2011). *Survei Sosial Ekonomi Daerah, Kabupaten Bandung*.
- Bappeda. (2011). *Grand Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung*, Bappeda Kabupaten Bandung.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Pearson. U.K.
- Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). *Measuring the Efficiency of Decision Making Units*, *European Journal of Operational Research*, 4, pp. 429-444.
- Coelli, T. T. (1996). *A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program* CEPA Working Paper 96/08. University of New England, Australia.
- Dunn, William, N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fre, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., Roos. P. (1992). *Productivity Change in Swedish Pharmacies 1980-1989: A Nonparametric Malmquist Approach, International Applications of Productivity and Efficiency Analysis*, pp. 81-97.
- Fauzi, A. (2010). *Landasan Pembangunan Perdesaan, Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara*, IPB Press.
- Hermawan, I. (2012). "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan," *MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*, Vol. 28, No. 2, pp. 135-144.
- Jamal, E. (2009). "Membangun Momentum Baru Pembangunan Perdesaan di Indonesia," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 28, No. 1, pp. 7-14.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta.
- Labombang, M. (2011). "Dampak Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Toli Toli, *Majalah Ilmiah Mektek, Th XIII No.1*, pp. 53-59.
- Leichtenstein, G.A., and T.S. Lyons. (2001). *The Entrepreneurial Development System: Transforming Business Talent and Community Economics*, *Economic Development Quarterly* 15#1, pp. 3-20.
- Malmquist, S. (1953). *Index Number and Indifference Surfaces*, *Trabajos de Estadística*, Vol.4 Issue 2, pp. 209-242.
- Murbeng, S. B., Mochamad Saleh, S., Riyanto. (2013). "Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Desa Bendungan Kecamatan Gondang Tulungagung," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 5, pp. 1257-1265.
- Nasution, A. R., Ernan Rustiadi, Bambang Juanda, Setia Hadi. (2014). "Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia," *MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*, Vol. 30, No. 2, pp. 137-148.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. (2009). *Materi Grand Strategy Nasional. PNPM Mandiri Perdesaan*.
- Riduan, A., Nasripani. (2014). "Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Socioscientia, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 1, pp. 33-38.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, R. D. (2009). 'Perencanaan dan Pengembangan Wilayah', Yayasan Obor Indonesia.
- Shaffer, R., S. Deller, and D. Marcouller. (2004). *Community Economics: Linking Theory and Practice*, Blackwell Publishing, Australia.
- Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. (2011). *Economic Development 11 Edition*,

- Pearson Education Limited, U.K.
- Widayati, S. (2013). Pemberdayaan Ekonomi Melalui dana Bergulir PNPB Mandiri bagi Kelompok SPP di Desa Sraten Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Vol. 24, No. 1, pp. 60-74.
- Widodo, Joko. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Bayu Media Publishing, Malang.
- Wisjnuaprpto. (2010). Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan dalam Memerangi Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan, Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, IPB Press.
- Yoruk, B.K., Zaim. O. (2005). Productivity Growth in OECD Countries: A Comparison with Malmquist Indices, *Journal of Comparative Economics*, 33, pp. 401-420.
- Yu, B., Liao, X., Shen, H. (2013). Parametric Decomposition of the Malmquist Index in an Output-Oriented Distance Function: Productivity in Chinese Agriculture, IFPRI Discussion Paper 01244.